

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil perolehan suara mayoritas masyarakat Kota Yogyakarta pada pemilu Legislatif 2009 menunjukkan adanya pergeseran perolehan suara mayoritas dari berbagai partai politik lainnya ke Partai Demokrat. Hal ini disebabkan karena sebagian massa pemilih (*voters*) mengubah pilihannya pada Pemilu Legislatif 2009. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi massa pemilih (*voters*) mengubah pilihan politiknya antara lain: faktor kekecewaan terhadap partai lama, faktor kepemimpinan dan ketokohan, faktor orientasi isu dan kebijakan politik, serta faktor komunikasi dan persuasi dalam kampanye. Faktor yang paling dominan mempengaruhi perubahan pilihan politik massa pemilih (*voters*) adalah faktor kekecewaan terhadap partai lama.
2. Pola perubahan pilihan politik massa pemilih (*voters*) di Kota Yogyakarta dapat dilihat dari budaya politiknya. Masyarakat Kota Yogyakarta dapat dikategorikan dalam budaya politik parokial, yaitu budaya politik dimana masyarakatnya hanya menaruh minat pada objek yang relatif sempit dalam batas tertentu, dalam hal ini masyarakat Kota Yogyakarta lebih terikat unsur partai berhaluan nasionalis, sehingga pola perubahan pilihan politik massa

pemilih di Kota Yogyakarta adalah linear atau searah. Secara mayoritas masyarakat melakukan pergeseran pilihan politik tetap pada partai nasionalis.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat pemilih (*voters*) dalam menentukan pilihannya ketika pemilu sebaiknya didasarkan pada pilihan hati nuraninya.
2. Tokoh masyarakat seyogyanya bisa bersikap arif dan bijaksana dalam membimbing warga masyarakat termasuk dalam bidang politik, demi terwujudnya integrasi masyarakat.
3. Partai politik peserta pemilu diharapkan dapat mencermati faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan pilihan politik massa pemilih, seperti faktor komunikasi dan persuasi dalam kampanye, faktor kepemimpinan dan ketokohan, faktor isu dan kebijakan politik, serta yang terpenting faktor kekecewaan terhadap partai, sebagai bahan koreksi dan pengalaman untuk memenangkan pemilu.
4. Pemerintah hendaknya memberikan sanksi yang tegas terhadap partai politik yang melakukan kecurangan dalam pemilu.